



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 544 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 484 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN NILAI KONTRIBUSI
PEMANFAATAN TANAH PADA KAWASAN KAMPUNG KETUPAT MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DI JALAN SUNGAI BARU,
KELURAHAN SUNGAI BARU, KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH,
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Juru Supervisi Indonesia tentang Pemanfaatan Aset Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin Di Kampung Ketupat Nomor: 100/006/KSB/BAGPEM/VI/2022, Nomor: 0032/SPK/JURU-PEMKOTBJM/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;
- c. bahwa menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 484 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Kontribusi Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Kampung Ketupat Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Jalan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Juru Supervisi Indonesia Nomor: 0052/SPP/JURU/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
 2. Telaahan Staf Nomor: 900/1682/BPKPAD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Perihal Telaahan staf mengenai Penawaran Hasil Appraisal KJPP atas Kawasan Kampung Ketupat;

3. Nota Dinas Nomor: 900/607/BPKPAD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal Mohon persetujuan untuk Permohonan Penetapan Penawaran Hasil Appraisal KJPP atas Kawasan Kampung Ketupat;
4. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor: 700/923-SET/ITKO tanggal 29 Mei 2023 Hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
5. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/612-PBMD/BPKPAD/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 Perihal Mohon Penetapan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 484 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Kontribusi Pemanfaatan Tanah Pada Kawasan Kampung Ketupat Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Di Jalan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga Diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:
Nilai Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per tahun untuk tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin seluas 2.100 (dua ribu seratus) meter persegi atau 30% (tiga puluh persen) dari total luas keseluruhan 7.007 (tujuh ribu tujuh) meter persegi.
- KEDUA** : Nilai Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA